ANALISIS PENERAPAN ELEMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3 DI PT. DAIWABO GARMENT INDONESIA PEMALANG

Cantika Fajar Ramadhani Widyakso¹, Ristiawati., S.KM.,M.Kes (Epid)², Jaya Maulana., S.KM.,M.Kes (Epid)³

cantikafajar2611@gmail.com¹, ristiawati_1985@yahoo.co.id², jayamaulana76@gmail.com³

Universitas Pekalongan

ABSTRAK

Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya dikarenakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan untuk mengendalikan risiko yang berhubungan dengan kegiatan bekerja agar terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk bisa menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan adanya upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam penerapan SMK3 terdapat dokumen rencana K3 yang merupakan salah satu bentuk dasar untuk memahami sistem dan mengkomunikasikan proses serta menentukan keefektifan penerapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pada elemen kedua yaitu pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 di PT. Daiwabo Garment Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu terdiri dari 1 informan utama, 2 informan pendukung dan 2 informan triangulasi. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan elemen kedua tentang pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 masih dalam proses persiapan (rencana). Hal ini dikarenakan, petugas P2K3 belum memiliki dokumentasi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3. Akan tetapi, perusahaan sudah memiliki dokumen identifikasi potensi bahaya yang berupa laporan Hirarc.

Kata Kunci: Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3, PP No. 50 Tahun 2012, SMK3

ABSTRACT

Every company is obliged to implement SMK3 in its company considering that it is part of the company's overall management system to control risks related to work activities in order to create a safe and comfortable work environment to be able to guarantee and protect the safety and health of workers through efforts to prevent accidents and work-related diseases. In implementing SMK3 there is an K3 plan document which is one of the basic forms for understanding the system and communicating the process and determining the effectiveness of the implementation. The purpose of this research is to determine the application of the second element, namely creating and documenting K3 plans at PT. Daiwabo Garment Indonesia complies This research is descriptive research. Informants in this study were selected using a purposive sampling technique, consisting of 1 main informant, 2 supporting informants and 2 triangulation informants. The results of this research are that the implementation of the second element regarding creating and documenting an K3 plan and it is still in the preparation process (plan). This is because P2K3 officers do not yet have documentation on identifying potential hazards, assessing and controlling K3 risks.

However, the company already has a document identifying potential dangers in the form of a Hirarc report.

Keywords: Making and Documenting K3 Plans, Government Regulation No. 50 of 2012, SMK3

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang sudah memperkerjakan pekerja atau buruh sekitar lebih dari 100 tenaga kerja dan perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi wajib untuk menerapkan SMK3 di perusahaan, karena merupakan komponen dari sistem manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko yang berhubungan dengan pekerjaan agar tercipta lingkungan yang nyaman, sehat aman dengan tujuan mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja..

Kebanyakan perusahaan di Indonesia merasa keberatan dengan adanya regulasi mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja, karena setiap perusahaan merasa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar dan tidak mau mengalami kerugian. Padahal tidak demikian, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menjadi langkah penghematan dan peningkatan produktivitas. Jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar dan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja/buruh di tempat kerja. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya finansial kepada pekerja yang mengalami kecatatan fisik hingga meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan bisa menghindari sedini mungkin dan dapat menekan risiko biaya pengeluaran kecelakaan atau penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja.

Terdapat dua sanksi bagi perusahaan jika tidak menerapkan peraturan perundangan nomor 50 tahun 2012 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi perusahaan. Sanksi administrasi dapat berbentuk adanya peringatan tegas, surat peringatan (SP), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produksi, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau semua alat produksi dan adanya pencabutan surat izin beroperasi. Sanksi pidana yang akan dikenakan untuk perusahaan berupa denda Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000 atau sanksi pidana berupa kurungan penjara 1 – 5 tahun.

Tenaga kerja harus diberikan training dan arahan terkait pentingnya K3 di tempat kerjanya. Dengan adanya training dan sosialisasi mengenai arahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk semua tenaga kerja dari perusahaan, menciptakan kondisi aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan akan memperoleh keyakinan yang besar dari keluarga tenaga kerja maupun para tenaga kerjanya. Serta pemerintah setempat akan memberikan keyakinan yang tinggi kepada perusahaan itu berada karena sudah mementingkan dan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja.

Berdasarkan studi pendahuluan, PT. Daiwabo Garment Indonesia telah menerapkan P2K3 berdasarkan Kepmenaker Nomor 4 Tahun 1987, sebagai upaya menerapkan keselamatan kerja, hygiene perusahaan dan kesehatan tenaga kerja untuk menghindari terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan pada pekerja dalam meningkatkan efisiensi dan kapasitas kerja. PT. Daiwabo Garment Indonesia sudah memiliki rencana K3 berupa pengadaan APD untuk tenaga kerja, sosialisasi tentang penerapan K3 di tempat kerja, jadwal pengecekan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan pengecekan Tanggap Darurat (Fire Alarm, Pintu darurat, Tangga darurat). Namun PT. Daiwabo Garment Indonesia belum memiliki rencana K3 sebagaimana tercantum dalam kriteria pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Oleh karena itu, peneliti terkesan melakukan penelitian

terhadap “Analisis Penerapan Elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 di PT. Daiwabo Garment Indonesia”.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada 5 orang informan dan dokumen yang memenuhi kriteria. Penggunaan jenis kualitatif dengan desain deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam penerapan pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 di PT. Daiwabo Garment Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode triangulasi (mengumpulkan semua hasil dari wawancara mendalam kedalam satu matriks dan dibuat kesimpulan dari hasil wawancara mendalam tersebut).

Dalam penelitian ini terdapat 5 orang informan yang bekerja di PT. Daiwabo Garment Indonesia. Informan utama dalam penelitian ini adalah 1 orang pekerja sebagai Asisten Supervisor HSE Compliance. Sedangkan, informan pendukung adalah 2 orang yaitu Supervisor maintenance dan Leader inspeksi. Informan triangulasi adalah 2 orang yaitu leader finishing dan leader cutting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Rencana K3

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 5 informan penelitian, dalam kriteria pertama yaitu strategi rencana K3 di PT. Daiwabo Garment Indonesia sudah memiliki petugas yang bersertifikat dan sudah memiliki petugas P2K3. Akan tetapi, perusahaan belum sepenuhnya memiliki dokumen penilaian dan pengendalian risiko K3. Perusahaan hanya memiliki dokumen identifikasi potensi bahaya berupa Hirarc. Perusahaan yang sudah memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) pekerja wajib untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat rencana K3 berladaskan tinjauan awal, peraturan dan informasi K3 karena merupakan salah satu kebijakan dari buyer.

Manual SMK3

Hasil observasi yang dilakukan dengan 5 informan penelitian, bahwa perusahaan sudah memiliki kebijakan perusahaan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggungjawab serta wewenang K3 dalam perusahaan. Dengan menetapkan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pengamatan dan evaluasi kinerja K3, pemantauan serta meningkatkan kinerja SMK3 akan berdampak pada jalannya kinerja K3 yang komprehensif. Oleh karena itu, wajib bagi setiap perusahaan untuk menerapkan SMK3.

Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain di Bidang K3

Hasil observasi yang dilakukan dengan 5 informan penelitian, bahwa perusahaan sudah terdapat dokumen prosedur dalam mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan. Prosedur serta petunjuk kerja berisi persyaratan berdasarkan peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 terdapat perubahan yang dilakukan untuk melakukan pemantauan prosedur dan petunjuk kerja.

Informasi K3

Hasil observasi yang dilakukan dengan 5 informan penelitian, diketahui bahwa perusahaan sudah secara sistematis dalam penyebaran informasi yang diperlukan oleh para pekerja terkait kegiatan K3. Informasi K3 di perusahaan berupa konten poster-poster penerapan K3 ditempat kerja dan terdapat rambu-rambu K3 di setiap area unit kerja,

penggunaan fasilitas APD untuk tenaga kerja sesuai standar yang berlaku, terdapat sosialisasi mengenai penerapan K3 di tempat kerja baik saat adanya tenaga kerja baru (training) maupun setiap adanya briefing dari leader setiap divisinya. Perusahaan juga menyediakan papan pengumuman untuk menyampaikan informasi baik mengenai perusahaan maupun dari bidang keselamatan dan kesehatan kerja untuk tenaga kerja, serta terdapat kotak saran bagi pekerja jika terdapat informasi yang dibutuhkan baik kritik atau saran yang ingin tenaga kerja sampaikan kepada pihak perusahaan melalui HSE-Compliance.

PEMBAHASAN

Strategi Rencana K3

PT. Daiwabo Garment Indonesia belum memiliki dokumen identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3, tetapi Perusahaan hanya memiliki dokumen identifikasi potensi bahaya berupa Hirarc dan petugas Ahli K3 maupun petugas P2K3 yang melakukan identifikasi potensi bahaya di setiap unit kerja Perusahaan. Penggunaan alat kerja, mesin produksi, lingkungan tempat kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi dapat dilakukan dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Dokumen tersebut akan berdampak untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Manual SMK3

PT. Daiwabo Garment Indonesia belum sepenuhnya menerapkan manual sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Akan tetapi, perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, pedoman di tempat kerja, dan wewenang serta tanggungjawab K3 untuk semua tingkatan di perusahaan, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3 dan pemantauan serta evaluasi kinerja K3 yang merupakan salah satu bentuk kebijakan dari para “buyer” kepada perusahaan dan wajib untuk mematuhi setiap kebijakan itu.

Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain di bidang K3

Perusahaan sudah menetapkan penanggungjawab untuk menyalurkan edaran terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis dan persyaratan lainnya guna dapat mengidentifikasi, memelihara dan memahami kepada seluruh pekerja. PT. Daiwabo Garment Indonesia sudah memiliki dokumen mengenai prosedur dan petunjuk kerja dan adanya pergantian yang berisi persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3. Terdapat pemantauan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3. Hasil peninjauan ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Informasi K3

PT. Daiwabo Garment Indonesia sudah secara sistematis dalam penyebaran informasi informasi yang dibutuhkan kepada seluruh pekerja dan tamu mengenai kegiatan K3 di tempat kerja. Informasi K3 tersebut berupa papan pengumuman informasi, poster-poster mengenai K3 atau tanda-tanda K3, sosialisasi K3 saat penerimaan karyawan baru (training) dan saat akan dimulainya pekerjaan terdapat himbauan untuk selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) serta selalu memprioritaskan K3 (briefing) tiap leader di unit kerja kepada anggota rekan kerjanya.

KESIMPULAN

Pada PT. Daiwabo Garment Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengimplementasikan penerapan pembuatan dan pendokumentasian rencana, dikarenakan PT DAI belum terdapat dokumentasi mengenai identifikasi potensi bahaya,

penilaian, dan pengendalian risiko K3. Akan tetapi, perusahaan hanya memiliki dokumen identifikasi potensi bahaya berupa Hirarc.

rekomendasi untuk pihak perusahaan untuk dijadikan bahan pengkajian dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada elemen pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 yaitu untuk menyusun dokumen identifikasi potensi bahaya, evaluasi dan pengendalian risiko K3 di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, S., Harianto, F., & Henggar, D. (2020). Analisis Tingkat Implementasi SMK3 pada Konstruksi Bangunan Di Surabaya Berdasarkan PP NO 50 Tahun 2012. *PADURAKSA : Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 73-79.
- Indonesia, P. (1970). *Keselamatan Kerja*. DKI Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Retrieved Februari 10, 2023
- Indonesia, P. (2003). *Ketenagakerjaan*. DKI Jakarta: Presiden Republik indonesia (RI). Retrieved Februari 10, 2023
- Indonesia, P. (2012). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Kementerian Sekretaria Negara Republik Indonesia (RI), Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. DKI Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Retrieved Februari 10, 2023
- Korneilis, & Gunawan, W. (2018). Manfaat Penerapan Sistem Manajemen K3 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident di Suatu Perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (SIMIKA)*, Vol. 1 No. 1.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Maulana, J. (2023, April). Analisis Potensi Bahaya dengan Menggunakan Metode (JSA) pada Pekerja di Ruang Produksi Departemen Spining I PT Kabana Textile Industries Kab. Pekalongan. *MPPKI : Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 627-631. Retrieved 01 09, 2023
- Maulana, J. (2023, Mei). Pembentukan Pokdarwis Serta Pendampingan Prosedur Keselamatan Kerja dalam Pengelolaan Wisata Perahu di Kelurahan Degayu Kota Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 407-413. doi:<https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.228>
- Ramli, S. (2013). *Sistem Management Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Rozi, M. F. (2022, Januari 31). Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 1, 267-282. doi:<https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/32733>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif Dan Konstruktif*. Bandung: ALFABETA.
- Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.